

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memanfaatkan bantuan *Indo-Pacific MSI* Amerika Serikat pada periode 2020–2023 sebagai instrumen *capacity building* untuk memperkuat dimensi *national security* di sektor maritim. Pemanfaatan tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk *Maritime Security Assistance* yang berorientasi pada pembangunan kapasitas, meliputi pembangunan infrastruktur pelatihan, penyediaan peralatan dan teknologi pengawasan, dukungan pendanaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan latihan bersama yang melibatkan berbagai institusi keamanan maritim Indonesia. Dengan demikian, MSI tidak dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kemampuan militer yang bersifat ofensif, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan stabilitas wilayah maritimnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan tersebut didorong oleh kondisi keamanan maritim Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan MDA, keterbatasan kemampuan operasi keamanan maritim, serta masih terbatasnya kapasitas institusi keamanan maritim dalam menghadapi ancaman lintas negara. Berbagai tantangan tersebut, sebagaimana dianalisis menggunakan *Conceptual Relations Framework* Bueger (2015b), telah dikonstruksikan sebagai isu yang berkaitan dengan *national security* karena berimplikasi terhadap kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan wilayah, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan nasional di domain maritim. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan bantuan melalui MSI menjadi salah satu upaya Indonesia untuk melengkapi kapasitas nasional melalui kerja sama keamanan maritim dengan Amerika Serikat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa berbagai bentuk bantuan yang diterima Indonesia melalui MSI telah memenuhi karakteristik *Maritime Security*

Assistance sebagaimana dijelaskan oleh Bueger et al. (2021). Hal tersebut tercermin dari pembangunan *Maritime Training Center* di Batam, penyediaan teknologi dan sistem pendukung pengawasan maritim, hibah peralatan seperti *ScanEagle Unmanned Aircraft System*, dukungan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur keamanan maritim, serta penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan, dan latihan bersama. Keseluruhan bentuk bantuan tersebut berorientasi pada peningkatan kapasitas institusi keamanan maritim Indonesia sehingga memperlihatkan bahwa implementasi MSI lebih menekankan pembangunan kemampuan jangka panjang dibandingkan pemberian bantuan yang bersifat sementara.

Berdasarkan analisis menggunakan *Security Practices and Communities of Practice Framework* Bueger (2015b), pemanfaatan bantuan MSI berkontribusi terhadap penguatan empat praktik utama keamanan maritim yang berkaitan langsung dengan dimensi *national security*. Pada praktik MDA, MSI meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memantau, mendeteksi, dan menganalisis aktivitas di wilayah perairan melalui penguatan sistem informasi, teknologi pengawasan, dan pusat fusi data maritim. Pada praktik *Sea Operations*, MSI mendukung peningkatan kesiapan operasional melalui pembangunan kapasitas personel, penyelenggaraan pelatihan dan latihan bersama, serta peningkatan interoperabilitas antarinstitusi. Pada praktik *Law Enforcement*, penguatan kapasitas tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kemampuan Indonesia dalam mengungkap berbagai kejahatan maritim transnasional, termasuk penyelundupan, pelanggaran hukum di laut, dan tindak pidana perdagangan orang melalui jalur maritim. Sementara itu, pada praktik *Capacity Building*, MSI berkontribusi melalui pembangunan kapasitas kelembagaan, transfer pengetahuan, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pelatihan, serta penguatan hubungan profesional antarlembaga yang mendukung peningkatan kemampuan institusi keamanan maritim Indonesia secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak seluruh praktik dalam *Spectrum of Practices* Bueger (2015b) terealisasi melalui implementasi MSI di Indonesia. Praktik *Naval Diplomacy* tidak menjadi temuan utama karena MSI pada hakikatnya merupakan instrumen *Maritime Security Assistance* yang berorientasi

pada *capacity building*, bukan instrumen diplomasi pertahanan ataupun kerja sama politik antarnegara. Sementara itu, praktik *Naval Warfare* juga tidak ditemukan dalam implementasi MSI selama periode penelitian karena berbagai bentuk bantuan yang diberikan lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan pengawasan, operasi keamanan maritim, penegakan hukum, dan pembangunan kapasitas institusi, bukan pada pembangunan kemampuan tempur maupun operasi peperangan laut.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan bantuan *Indo-Pacific* MSI Amerika Serikat pada periode 2020–2023 telah berkontribusi terhadap penguatan dimensi *national security* Indonesia melalui pembangunan kapasitas keamanan maritim yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Kontribusi tersebut tidak hanya tercermin pada peningkatan kemampuan teknis institusi keamanan maritim, tetapi juga pada meningkatnya kemampuan negara dalam membangun MDA, melaksanakan operasi keamanan maritim, memperkuat penegakan hukum di laut, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan yang mendukung pengelolaan keamanan maritim secara berkelanjutan. Oleh karena itu, MSI dapat dipahami sebagai instrumen *capacity building* yang melengkapi kapasitas nasional Indonesia dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan maritim sekaligus memperkuat kemampuan negara dalam menjaga kepentingan nasional di domain maritim selama periode 2020–2023.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya memfokuskan analisis pada kontribusi pemanfaatan bantuan *Indo-Pacific MSI* terhadap dimensi *national security* menggunakan *Conceptual Relations Framework*, *Building Maritime Security through Capacity Building with External Assistance*, serta *Security Practices and Communities of Practice Framework* yang dikemukakan oleh Bueger (2015b; 2021). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan dimensi keamanan maritim lainnya, seperti *human security*, *marine environment*, maupun *economic security*, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi bantuan keamanan maritim terhadap berbagai aspek keamanan maritim Indonesia.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan analisis dengan membandingkan implementasi bantuan keamanan maritim yang diterima Indonesia dari negara mitra lainnya atau mengevaluasi perkembangan implementasi MSI setelah tahun 2023, khususnya setelah ditingkatkannya hubungan Indonesia–Amerika Serikat menjadi *Comprehensive Strategic Partnership*. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji efektivitas jangka panjang bantuan yang telah diterima Indonesia, terutama dalam aspek *MDA*, *Sea Operations*, *Law Enforcement*, dan *Capacity Building*, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan dan efektivitas *Maritime Security Assistance* sebagai instrumen penguatan kapasitas keamanan maritim Indonesia.

6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat keamanan maritim Indonesia.

Pertama, Pemerintah Indonesia perlu terus mengoptimalkan pemanfaatan bantuan melalui *Indo-Pacific MSI* dengan memastikan bahwa setiap bentuk *Maritime Security Assistance* yang diterima tidak hanya dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada pembangunan kapasitas institusi keamanan maritim secara berkelanjutan. Penguatan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemeliharaan dan optimalisasi teknologi yang telah diterima, serta pengembangan sistem pengawasan maritim yang semakin terintegrasi.

Kedua, pemerintah perlu terus memperkuat kapasitas operasi keamanan maritim melalui peningkatan interoperabilitas antarinstansi, pengembangan mekanisme pertukaran data dan informasi secara real time, serta optimalisasi pemanfaatan pusat informasi maritim nasional. Mengingat berbagai ancaman maritim bersifat lintas sektor dan lintas yurisdiksi, penguatan sinergi antara Bakamla RI, TNI AL, Kepolisian Perairan dan Udara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta instansi terkait lainnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, operasi keamanan maritim, penegakan hukum, dan perlindungan wilayah perairan Indonesia.

Ketiga, Pemerintah Indonesia perlu terus mengembangkan kerja sama keamanan maritim dengan berbagai negara mitra, termasuk Amerika Serikat, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pemanfaatan bantuan internasional hendaknya diposisikan sebagai *capacity enhancer* bagi kemampuan nasional, sehingga pembangunan kapasitas keamanan maritim Indonesia tetap bertumpu pada penguatan institusi domestik dan tidak menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan eksternal.